

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN KINERJA DI PAKAN RABAA TENGAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

¹Leo Rianto Syahputra
²Syamsir

Departemen Ilmu Administrasi Negara ^{1,2}
Universitas Negeri Padang
Email : leoriantosyahputra12@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah memberlakukan UU Desa. Hukum adalah angin segar bagi desa, karena memungkinkannya untuk mengelola kebutuhannya sendiri. Untuk membantu implementasi UU tersebut, pemerintah menyalurkan dana, khususnya Dana Desa sebesar 1 miliar dolar AS per desa. Tak terkecuali desa-desa di Provinsi Sumatera Barat, yang dijuluki "nagari". Efektivitas Pemerintah Nagari dalam mengelola Dana Desa sangat disegani, khususnya Wali Nagari, istilah lain untuk Kepala Desa, yang dibantu oleh aparatur Nagari, antara lain Sekretaris Nagari, Kepala Bagian, Kepala Urusan, dan Kepala Desa/Jorong. Peningkatan kapasitas aparatur nagari dilakukan untuk memastikan pemahaman tentang bagaimana tugas pokok dan fungsi dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas Peningkatan Kapasitas Peralatan Nagari dalam meningkatkan kinerja. Ini adalah studi kualitatif yang akan merinci proses pengembangan kapasitas untuk seluruh aparatur Rabaa Feed Nagari Tengah. Menyusul pelaksanaan berbagai metode peningkatan kapasitas, termasuk pengajaran di kelas, pendampingan dan bimbingan dari instansi terkait, serta bimbingan dan fasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesi Kementerian Desa, aparatur Rabaa Nagari Pakan Pusat telah mampu melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemerintahan.

Kata Kunci : Peningkatan Kapasitas, Perangkat Desa, Kinerja

LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Desa dapat mengatur kehidupannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dalam menunjang pelaksanaan Undang-undang Desa tersebut, pemerintah memberikan stimulan dana yang langsung diberikan ke setiap desa yang ada diseluruh kawasan Negara Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke yang disebut Dana Desa (DD). Dana Desa tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa tenaga kerja yang disebut Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari seorang Sekretaris Desa, beberapa Kepala Seksi, dan beberapa Kepala Urusan yang di tetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

Sama halnya dengan Nagari-nagari (sebutan desa di Sumatera Barat) lain, Nagari Pakan Rabaa Tengah juga mendapatkan Dana Desa mulai dari Tahun 2015 hingga sekarang. Dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah nagari dituntut memiliki kapasitas dan kompetensi yang bagus mengingat dana yang dikelola tidaklah sedikit. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Nagari diawasi oleh berbagai pihak yaitu Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di kawasan Nagari tersebut yang ditetapkan oleh pihak Kabupaten. Selain itu, nagari juga diawasi oleh dinas terkait, serta adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang di tetapkan melalui keputusan Kementrian Desa.

Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan Dana Desa ini mengacu pada tahapan-tahapan sesuai regulasi yang ada. Tahapan tersebut dimulai dari Tahapan Perencanaan, dilanjutkan dengan Tahapan Pelaksanaan dan diakhiri pada Tahapan Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing tahapan memiliki *Deadline* masing-masing setiap bulannya. Begitu juga halnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Tengah.

Namun, fakta yang ditemui dilapangan dengan menggali informasi melalui observasi dan wawancara langsung dengan Wali Nagari, BAMUS serta Tenaga Pendamping Desa adalah seringnya terjadi keterlambatan setiap tahapan kegiatan baik tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan dan evaluasi. Hal tersebut diakibatkan oleh masih kurangnya kapasitas dan pemahaman Perangkat Nagari tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) jabatan masing-masing.

Tahapan pelaksanaan kegiatan masih tertumpu pada satu atau dua orang saja. Sedangkan masih ada tugas-tugas yang masih dinilai lambat dalam pelaksanaannya. Sehingga, apa yang dicita-citakan belum bisa terwujud sepenuhnya. Dengan banyaknya pekerjaan yang tertunda mengakibatkan sering terjadi keterlambatan tahapan kegiatan. Perangkat Nagari sibuk mengejar ketertinggalan tahapan, akibatnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan desa tidak terlaksana. Jenis kegiatan terlihat monoton dan belum mengarah ke pengembangan secara maksimal ke potensi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan: Peningkatan Kapasitas

Perangkat Nagari dalam Pelaksanaan Kinerja di Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang memiliki kualitas, di mana fakta disajikan dalam kondisi yang wajar atau dalam bentuk aslinya, tanpa menggunakan simbol atau angka.

Subjek atau Sasaran penelitian ini adalah seluruh Perangkat serta staf Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan. Perangkat beserta staf Nagari Pakan Rabaa Tengah ter berjumlah 24 orang dengan rincian sebanyak 19 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sedangkan objek penelitian ini adalah peningkatan kapasitas perangkat nagari dalam pelaksanaan kerjanya.

Untuk jenis data yaitu (1) data primer adalah informasi yang dikumpulkan selama studi lapangan dan dari narasumber melalui pertanyaan dan tanggapan langsung dan penggunaan peralatan penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi, dan alat perekam. (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur berupa buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang dapat memberikan informasi terkait analisis kegiatan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini:

1. Review Literatur/Dokumentasi Studi pustaka merupakan metode untuk memperoleh data penelitian tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.
2. Observasi Observasi adalah strategi pengumpulan data dengan mengamati individu-individu penelitian. Dengan memanfaatkan teknik ini, dimungkinkan untuk memastikan pola perilaku subjek untuk memperoleh data dengan segera, tanpa perlu bertanya.
3. Wawancara Ekstensif Wawancara adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan lisan kepada informan, yang kemudian dijawab secara lisan atau tertulis, untuk memperoleh informasi yang lebih rinci tentang sikap, pengetahuan, dan perilaku mereka dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

Pengolahan data menggunakan teknik MDAP (*Manual Data Analysis Procedure*) yang dikemukakan oleh Burhan Bungin yaitu analisa data kualitatif yang dilakukan secara manual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Pakan Rabaa Tengah yang beralamat di Jorong Bancah anak lolo Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu Wali Nagari Pakan Rabaa Tengah dan Ketua Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) didapatkan informasi bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kinerja perangkat nagari bisa dikatakan kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan lambatnya progres kegiatan di nagari. Mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan kegiatan tahun berjalan.

Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Nagari Pakan Rabaa Tengah

Peningkatan kapasitas nagari dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Berikut uraian bentuk-bentuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan:

1. Pelatihan In Class

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas yang menjadi pilihan utama adalah pelatihan In Class dengan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur yang berhubungan langsung dengan pengawasan dan pembinaan nagari. Kegiatan ini dianggarkan dengan dana nagari yang tertuang dalam APB Nagari. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, dilakukan rapat kerja ditingkat pemerintah nagari untuk mengidentifikasi kebutuhan materi yang sesuai dengan permasalahan kinerja yang ada. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, maka di buat matrik dan jadwal pelaksanaan pelatihan serta narasumber yang sesuai dengan materi pelatihan.

2. Monitoring dan Bimbingan dari OPD terkait

Dalam pelaksanaan seluruh bidang kegiatan di nagari tidak terlepas dari OPD terkait. Seluruh aspek kegiatan dan bidang dilaksanakan di nagari. Contoh kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan dan penanganan stunting serta kegiatan kesehatan lainnya, nagari berhubungan dan dibina oleh dinas kesehatan. Untuk kegiatan-kegiatan berhubungan dengan keagamaan, nagari dibina oleh Kemenag dan Kesra Kabupaten. Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, nagari dibina oleh dinas pendidikan. Kegiatan penanggulangan bencana skala nagari, pemerintah nagari dibantu dan dibina oleh BNPB. Penyelenggaraan kegiatan fisik atau sarana prasarana, nagari dibina oleh Dinas PU. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tata permukiman, nagari berhubungan dengan Dinas PerumLH. Panduan dalam alur pencairan dana tahap demi tahapan, pihak nagari dibina oleh BPKAD. Dalam pelaporan pertanggung jawaban, pihak nagari selalu setiap tahunnya diperiksa dan dibina oleh Inspektorat. Serta yang tak kalah pentingnya Dinas yang hampir setiap hari melakukan koordinasi dengan pemerintah nagari adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DINSOSPMD/N) Kabupaten Solok Selatan.

3. Pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dengan lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Negara kita melalui Kementerian desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) menyusun program pemerintah yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah memberikan bantuan dana yang disebut Dana Desa (DD) yang dianggarkan melalui APBN dan ditransferkan ke rekening desa/nagari tanpa ada potongan apapun. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit tersebut, maka sangat riskan sekali berpotensi adanya penyelewengan oleh pihak-pihak yang mengelola dana tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, maka Kementerian Desa membuat program pendampingan nagari oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP). TPP ini berada langsung di bawah Kementerian Desa dan dikontrak oleh Kementerian Desa.

Secara umum ada beberapa kendala yang ditemui dalam upaya peningkatan kapasitas perangkat nagari. Dari segi pelatihan *in class*, sering sekali terjadi keseriusan dalam mengikuti pelatihan masih kurang untuk beberapa orang. Karena melatih orang dewasa sangat berbeda sekali dengan melatih anak usia sekolah. Masih banyak yang terlambat masuk ke ruang pelatihan dan ada juga yang hilir mudik keluar ketiga jam pelajaran

bahkan ada yang tidak masuk sama sekali.

Dari segi bimbingan dari berbagai OPD, menurut hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari Pakan Rabaa Tengah didapatkan informasi bahwa kendala yang sering terjadi adalah kurang rutinnnya atau kurang terjadwalnya pembimbingan yang dilakukan ke nagari. Terkadang sering sekali terjadi kunjungan dan pelaksanaan bimbingan yang kurang sesuai dengan waktu pelaksanaan. Contoh, salah satu OPD datang dan membahas tentang tahapan perencanaan, padahal deadline perencanaan sudah selesai malahan sudah dalam tahap pelaksanaan kegiatan sehingga kurang tepat dilaksanakan bimbingan.

Dari segi pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), kendala yang sering terjadi adalah ketika nagari butuh dampingan atau bimbingan yang harus dilaksanakan pada hari ini tidak dapat dilaksanakan maksimal dikarena tenaga pendamping tidak bisa hadir. Hal tersebut disebabkan karena seorang tenaga pendamping tersebut memiliki lokasi tugas di beberapa nagari.

Pelaksanaan Tahapan Kegiatan di Nagari Pakan Rabaa Tengah Tahun 2021 setelah dilakukannya Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari

1. Tahapan Perencanaan Tahun 2022

Tahapan Perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dimana telah dilaksanakan awal tahapan perencanaan yaitu berupa kegiatan Musyawarah Nagari tentang Sosialisasi Perencanaan tahun 2022. Kaur Perencanaan melakukan koordinasi dengan sekretaris nagari dalam menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah sosialisasi dengan menyiapkan semua kelengkapan administrasi. Kemudian bersama-sama menghadap ke Wali Nagari untuk membahas jadwal tersebut. Kemudian Wali Nagari melakukan koordinasi ke Ketua BAMUS nagari untuk dilaksanakan Musyawarah Nagari Sosialisasi Perencanaan Tahun 2022.

Nagari Pakan Rabaa Tengah telah melaksanakan Musrenbang Nagari penetapan RKP Tahun 2022 pada Minggu kedua September 2021 dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yaitu Pelaksanaan Musrenbang dilakukan nagari paling lambat pada bulan september tahun berjalan. Hal tersebut dapat terlaksana karena pahamiannya kaur perencanaan dalam jadwal dan tahapan demi tahapan perencanaan nagari.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 di Nagari Pakan Rabaa Tengah sudah terlaksana dari Bulan Maret tahun 2021. Keterlambatan tersebut diakibatkan karena lambatnya penyelesaian APB Nagari tahun 2021 yang diselesaikan pada Bulan Februari Tahun 2021 yang seharusnya telah selesai pada Desember 2020. Dana tahap I masuk pada Bulan Maret 2021. Seluruh perangkat nagari bergerak cepat dalam merealisasikan kegiatan tahun 2021. Karena banyak kegiatan yang tertunda akibat terlambatnya proses perencanaan. Namun karena telah mendapatkan banyak pelatihan dan bimbingan sehingga di semester 1 yaitu akhir Juni 2021 kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang dibuat. Pada minggu ketiga Juni, seluruh Pelaksana Kegiatan telah menyelesaikan laporan semester 1 lengkap dengan pertanggungjawabannya. Sehingga laporan semester 1 dilaporkan ke kabupaten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu paling lambat minggu kedua juli tahun berjalan. Setelah laporan semester 1 masuk dan disetujui, dana tahap II masuk ke rekening nagari. Setiap awal minggu selalu dilakukan rapat koordinasi internal perangkat nagari dalam penyusunan rencana kerja mingguan untuk memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana.

Pada Bulan Oktober tahun 2021, Nagari wajib melaporkan realisasi penggunaan Dana yaitu 75% realisasi dana dengan 50% bobot pekerjaan fisik sebagai syarat pencairan dana tahap III. Nagari Pakan Rabaa Tengah tidak terkendala sama sekali dengan laporan tersebut, karena capaian realisasi nagari telah melebihi target, sehingga tidak ada masalah dalam pencairan dana tahap III. Pada Bulan November ini, nagari tinggal merealisasikan sisa-sisa kegiatan dan dalam target nagari yaitu di Minggu kedua Desember semua dana telah terealisasi lengkap dengan pertanggung jawabannya. Sehingga tidak adalagi istilah “lembur penyusunan SPJ “ lagi. Hal tersebut terlaksana karena seluruh perangkat nagari telah mengetahui dan paham sekali tentang tahapan demi tahapan kegiatan masing-masingnya. Hal tersebut tidak terlepas dari hasil peningkatan kapasitas para perangkat nagari.

3. Tahapan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban di nagari sering sekali disebut SPJ (Surat Pertanggungjawaban) atau ada juga yang menyebut LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). Pada tahun-tahun sebelumnya karena perangkat nagari kurang memahami tahapan kegiatan, selalu terkesan menumpuk realisasi kegiatan. Dikerjakan secara keseluruhan sehingga membuat bingung dan meragukan. Pembukuan terkadang tumpang tindih dan campur aduk. Namun, setelah dilakukannya peningkatan kapasitas dengan berbagai metode, Perangkat Nagari Pakan Rabaa Tengah memahami bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban harus dilaksanakan segera setelah kegiatan dilaksanakan. Apalagi sekarang telah memakai aplikasi siskeudes yang mempermudah penyusunan kwitansi-kwitansi belanja. Tinggal di print kan dan diminta stempel ke toko. Begitu juga aturan yang ada yang mewajibkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana harus selesai terlebih dahulu sebelum mengajukan pencairan dana berikutnya. Sehingga tidak adalagi alasan menumpuk SPJ. Di Nagari Pakan Rabaa Tengah untuk Tahun 2021 ini telah berjalan sesuai dengan alur tahapan sehingga di Minggu ketiga Desember Nagari bisa lebih lega dalam mempersiapkan kegiatan 2022 karena seluruh kegiatan tahun 2021 telah dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan seluruh uraian kegiatan pelaksanaan pemerintahan nagari Pakan Rabaa Tengah Tahun 2021 yang telah sesuai dengan tahapan yang seharusnya, maka dapat dikatakan bahwa Kegiatan peningkatan kapasitas Perangkat Nagari Pakan Rabaa Tengah dapat menjadi solusi peningkatan kinerja perangkat nagari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

KESIMPULAN

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar bagi desa. Di dalam UU tersebut diatur sedemikian rupa bahwa desa diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pemerintahannya sendiri demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya melewati beberapa tahapan sesuai regulasi yang ada. Pemerintah nagari harus melaksanakan kegiatan sesuai regulasi tersebut. Namun, kapasitas SDM atau perangkat nagari juga menjadi faktor utama dalam pelaksanaan seluruh tahapan yang ada.

Nagari akan Rabaa Tengah merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini dipinpin oleh Wali Nagari dan dibantu oleh perangkatan nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, 3 Orang Kepala Seksi dan 3 Orang Kepala Urusan serta Kepala Jorong sebagai Pelaksana Kewilayahan. Masing-masing memiliki Tugas yang berbeda-beda dan beban kerja

yang tidak sedikit.

Dengan banyaknya beban kerja perangkat nagari yang dimulai dari tahapan perencanaan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang dan diakhiri dengan tahapan pertanggungjawaban, maka dinilai perlu adanya solusi dalam membekali perangkat tersebut agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan kapasitas perangkat nagari tersebut. Peningkatan kapasitas dinilai mampu meningkatkan kinerja perangkat nagari.

Setelah dilakukannya berbagai model kegiatan peningkatan kapasitas di tahun 2021, Perangkat nagari Pakan Rabaa Tengah dinilai mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan diselesaikannya semua tahapan kegiatan serta penyusunan segala dokumen setiap tahapan tepat waktu. Jika semua kegiatan dilaksanakan tepat waktu, maka tugas nagari melalui perangkatnya terhadap pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik. Sehingga cita-cita menjadikan nagari Pakan Rabaa menjadi nagari yang maju dan berkembang disegala bidang dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Michellia. 2015. Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Skripsi*: Riau: Universitas Riau.
- Anggraini, Kiki dkk. 2020. Pengembangan Kapasitas Pegawai untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Administrasi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Asrori. 2014. *Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa di kabupaten kudos*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri
- Atika, Dewie Brima. 2018. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyusunan Laporan Keuangan Desa se-Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. *Jurnal*. Lampung: Universitas Lampung.
- Bungin, Burhan. 2019. *Social Research Methods*.
- Fajarwati, Neri. 2019. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Maulidyah, Yunta Fa'ubi dkk. 2019. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Muhammad, Iqbal. 2020. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. *Skripsi*. DI Aceh: UIN AR-RANIRY
- Panduan Penyusunan Skripsi Mahasiswa FISIP UNP Tahun 2017
- Permendagri 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendes No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021
- Permendagri No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

- Prawitno, Ashar. 2014. Pengembangan kapasitas organisasi Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sari, Ririn Nur indah dkk. 2016. Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja. *Jurnal*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Simin dkk. 2019. Pengembangan Kualitas Perangkat Desa melalui Penerapan Pengukuran Kinerja Perangkat Desa di Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. *Jurnal*. Purwokerto: Universitas Jendral Susirman
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Vestikowati, Endah. 2020. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Skripsi*. Ciamis: Universitas Galuh.
- Wuri, Rendra Risto. 2020. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Skripsi*. Manado: UNSRAT.